

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
STUDI KASUS DI SMASNU SUMENEP**
(Analisis Tantangan, Nilai Sosial Budaya, Dan Peran Masyarakat Madura)



Oleh:

Nur Aiman

NIM. 23200012071

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk memenuhi salah satu Syarat guna memperoleh Gelar
Master Of Arts (M.A)

Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi Islam dan Pembangunan Kebijakan Publik

YOGYAKARTA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aiman
NIM : 23200012071
Jenjang : Magister
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam dan Pembangunan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk berdasarkan sumber yang dikutip berdasarkan kode etik sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 23 April 2026

Saya yang menyatakan,



Nur Aiman, S.Pd.
NIM: 23200012071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aiman
NIM : 23200012071
Jenjang : Magister
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam dan Pembangunan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 23 April 2026

Saya yang menyatakan,



Nur Aiman, S.Pd.
NIM: 23200012071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

B. Marsda Adiucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-577/Uin.02/DPP/PP.00.005/2026

Tugas Akhir dengan judul : Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Studi Kasus di SMA5NU Samsop
(Analisis Tantangan, Nilai Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Madani)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR AAMAN, S.Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 23200012071
Telah diajukan pada : Jumat, 22 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Pengaji I

Dr. ZULFIKAR BISMIL, Lc., MA.
SIGNED

Valid ID: 6a12268d666



Pengaji II

Dr. Phil. Ahmad Nurris Permana, S. Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a140c728ee



Pengaji III

Dr. Rama Ulumoko, S.S., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a1f00d1201



Yogyakarta, 22 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Direktor Pascasarjana

Prof. Dr. Much. Nurkhairun, S. Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a191071e0e

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Asslamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul **Implemintasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Studi Kasus Di SMASNU Sumenep: Analisis tantangan, nilai sosial budaya dan Peran Masyarakat Madura**

Yditulis oleh:

Nama : Nur Aiman, S.Pd
NIM : 23200012071
Jenjang : Magister
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar *Magister of Art* (M.A).

Dengan ini kami berharap agar tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 April 2026

Pembimbing,



Ahmad Norma Permata, S.Ag., Ph. D, M.A
NIP. 1971207 200901 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMASNU Sumenep, dengan memusatkan perhatian pada tiga aspek pokok: dinamika implementasi kebijakan dalam kerangka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2024, praktik diskresi guru sebagai *street-level bureaucrats* dalam pelaksanaan kebijakan, serta pengaruh nilai sosial budaya masyarakat Madura terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketiga aspek tersebut secara mendalam guna memahami bagaimana kebijakan inklusif dihayati, diadaptasi, dan dijalankan di tingkat sekolah dalam konteks masyarakat religius komunal. Argumen sentral penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif tidak dapat dipahami secara linear dan mekanis berdasarkan teks regulasi formal, melainkan merupakan proses negosiasi yang dinamis antara norma kebijakan, kapasitas institusi, diskresi aktor pelaksana lapangan, dan ekologi nilai sosial budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru pendamping khusus, dan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan teori *Street-Level Bureaucracy* Michael Lipsky sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan pokok: pertama, implementasi kebijakan berlangsung melalui proses adaptasi dan interpretasi di tingkat sekolah, dengan keterbatasan anggaran dan minimnya GPK sebagai hambatan struktural utama; kedua, diskresi guru bersifat adaptif-progresif, berfungsi sebagai jembatan antara norma kebijakan dan realitas kelas sekaligus instrumen kreatif yang memastikan layanan inklusif tetap berjalan substantif; ketiga, nilai-nilai sosial budaya Madura seperti *tengka'*, hierarki moral *bhuppa'-bhabbhu'-ghuru-rato*, serta otoritas kiai berpengaruh signifikan dalam membentuk penerimaan dan pelaksanaan pendidikan inklusif di masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pendidikan inklusif memerlukan pendekatan kebijakan yang integratif tidak hanya regulatif dan teknis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial budaya lokal serta melibatkan aktor komunitas sebagai mitra strategis.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif, Street-Level Bureaucracy, Diskresi Guru, Nilai Sosial Budaya Madura.

MOTTO

Hina ketika mencari, mulia ketika dicari



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.”

(Q.S. Al-Insyirah:6-7)

Karya ini lahir dari perjalanan panjang yang tidak selalu mudah dari lelah yang kerap disembunyikan, ragu yang datang tanpa aba-aba, serta doa-doa yang diam-diam menjaga penulis tetap bertahan hingga sampai pada titik ini. Dengan penuh syukur kepada Allah Swt., karya sederhana ini penulis persembahkan kepada Bapak dan Ibu tercinta, yang kasih, pengorbanan, dan doanya selalu menjadi rumah paling kokoh bagi setiap langkah penulis; kepada saudara-saudaraku tersayang, yang dengan cara-cara sederhana senantiasa menghadirkan semangat di tengah perjalanan ini; kepada anak-anak berkebutuhan khusus di Sumenep, Madura, yang mengajarkan bahwa pendidikan bukan sekadar tentang pengetahuan, melainkan tentang memanusiakan manusia dengan ketulusan dan kesabaran; kepada Madura, tanah kelahiran yang keras di permukaan namun hangat dalam nilai dan pengabdian, semoga karya kecil ini menjadi bagian dari ikhtiar merawat ingatan dan kearifan yang tumbuh di dalamnya; serta kepada para guru, dosen pembimbing, dan almamater tercinta, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi ruang bertumbuh bagi penulis dalam memahami ilmu, kehidupan, dan kemanusiaan. Semoga segala doa, dukungan, dan kebaikan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah menjadikan proses berpikir sebagai salah satu bentuk ibadah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., yang mengajarkan bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya itu tidak memilih siapa yang berhak untuk menerimanya.

Tesis ini hadir dari sebuah kegelisahan yang sudah lama penulis simpan. Bahwa kebijakan pendidikan inklusif sekuat apa pun bunyi regulasinya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya di mana ia diterapkan. Di Sumenep, dengan segala kekayaan nilai ke-Madura-annya, pertanyaan itu menjadi semakin menarik dan mendesak untuk dijawab. Maka lahirlah tesis berjudul ***“Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Kasus di SMASNU Sumenep Analisis Tantangan, Nilai Sosial Budaya, dan Peran Masyarakat Madura”*** ini, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Proses penelitian ini bukan hanya tentang mengumpulkan data. Ia adalah perjalanan mendengarkan mendengarkan kepala sekolah yang bicara dengan nada hati-hati, guru-guru yang bersemangat di balik keterbatasan, dan masyarakat Madura yang ternyata menyimpan kearifan tersendiri dalam cara mereka memandang keberagaman. Setiap percakapan di lapangan mengendap dan membentuk cara penulis memahami apa yang selama ini hanya terbaca di literatur.

Tentu, karya ini tidak lahir sendiri. Ada banyak tangan yang ikut menopang, dan penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas visi kepemimpinan yang mendorong tradisi riset yang terbuka dan berakar pada nilai keislaman

2. Bapak Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas iklim akademik yang beliau bangun sehingga ruang berpikir kritis dapat tumbuh dengan sehat.
3. Bapak Ahmad Rafiq, S. Ag, M.A., Ph. D, Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Bapak Najib Kailani, S. Fil., I., M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, atas bimbingan dan kemudahan yang diberikan sepanjang proses studi berlangsung.
5. Ibu Dr. Subi Nur Isnaini, M.A., selaku Sekretaris Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
6. Bapak Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.d., Dosen Pembimbing tesis penulis, sekaligus dosen utama kami dalam konsentrasi ini, Terima kasih telah bersedia membimbing, yang dengan sabar membaca setiap draf, memberi catatan yang membangun, dan tidak pernah kehilangan kepercayaan pada arah penelitian ini. Sekali lagi terima kasih telah memotivasi dalam setiap kuliahnya dan memberi kemudahan dalam mengarahkan pembuatan tesis ini hingga selesai.
7. Seluruh Dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah meninggalkan bukan hanya ilmu, tetapi juga cara pandang yang berbeda dalam memahami dunia.
8. Segenap staff dan karyawan di Program studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan bantuannya kepada peneliti dalam mengurus berbagai hal terkait perkuliahan
9. Kepala Sekolah, guru-guru, dan seluruh warga SMASNU Sumenep, yang dengan tangan terbuka menerima penulis di tengah-tengah keseharian mereka dan bersedia berbagi cerita dengan jujur.
10. Kepada Orang Tua saya, Eppa' Emma' tercinta, serta Adik-adikku, yang telah menjadi sistem penyangga paling kokoh sepanjang perjalanan ini. Terimakasih sebesar-besarnya.

11. Teman-teman seperjuangan Program Pascasarjana angkatan 2024-2025 yang di setiap sesi diskusi baik yang formal maupun yang spontan di koridor kampus selalu menambah perspektif yang tidak bisa penulis dapatkan dari bacaan. Terkhusus Kepada kawan-kawan Keluarga Mahasiswa Pascasarjan (KMP) yang luar biasa. terima kasih senang rasanya bias kenal dan berdiskusi bersama kalian.
12. Semua pihak yang turut berperan, yang namanya tidak sempat tersebut satu per satu. Kebaikan kalian tidak hilang begitu saja.

Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, dan doa yang yang diberikan oleh berbagai pihak kepada peneliti senantiasa diterima dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, Peneliti tidak berpretensi bahwa tesis ini telah menjawab semua pertanyaan. Justru sebaliknya penelitian ini membuka lebih banyak pintu yang perlu diketuk oleh peneliti-peneliti berikutnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis sambut, karena ilmu pengetahuan hanya bisa tumbuh jika kita berani untuk terus mempertanyakannya. Semoga karya ini bermanfaat setidaknya untuk satu orang yang membacanya dengan sungguh-sungguh. *Amin ya robbal-alamin.*

Yogyakarta, 22 April 2026

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nur Aiman, S.Pd

NIM: 23200012071

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	I
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
NOTA DINAS PEMBIMBING	IV
ABSTRAK	V
MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	XI
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Signifikasi	10
D. Kajian Pustaka	12
E. Kerangka Teoritis	17
1. Biografi Michael Lipsky	17
2. Karya-Karya Utama Michael Lipsky	19
3. Relevansi Teori Street Level Bureacracy	20
4. Teori Implementasi Kebijakan Publik: Pendekatan Bottom-Up	22
F. Metode Penelitian	25
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
2. Lokasi dan Subjek Penelitian	27
3. Teknik Pengumpulan Data	30
4. Analisis Data	32
5. Keabsahan Data	35
G. Sistematika Pembahasan	37

BAB II	41
GAMBARAN UMUM.....	41
A. Gambaran Umum Kabupaten Sumenep.....	41
1. Profil Kabupaten Sumenep.....	41
2. Struktur Pemerintahan, dan Kewenangan Daerah.....	41
3. Perkembangan Pendidikan Di Indonesia.....	41
4. Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Sumenep	41
5. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Madura di Kabupaten Sumenep	41
B. Gambaran Umum SMASNU	41
• Profil Singkat Lembaga SMASNU	41
• Visi, Misi, dan Tujuan Kelembagaan	46
BAB III.....	50
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF MELALUI PERBUB SUMENEP NO. 13/2024	50
A. Situasi Pendidikan di Kabupaten Sumenep.....	50
B. Peran Tokoh Masyarakat dalam Pendidikan Inklusif	56
C. Peraturan Bupati Sumenep No 13 Tahun 2024 Sebagai Kerangka Kebijakan Pendidikan Inklusif.....	59
1. Pemenuhan Hak Dan Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan.....	66
2. Aksesibilitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan	68
3. Penyediaan Guru Pendamping Khusus (GPK).....	72
4. Peningkatan Kompetensi Guru dan Pelatihan	77
5. Koordinasi dan Pengawasan Dinas Pendidikan	82
D. Tantangan dan Hambatan Implementasi	87
BAB IV.....	91
ANALISIS IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SUMENEP MELALUI PERSPEKTIF TEORI MICHAEL LIPSKY	91
A. Implementasi pendidikan inklusif dalam pandangan Michael lipsky	91
B. Rekonstruksi Teori Street Level Bureaucracy	95

C.	Guru Sebagai Street Level Bureaucrats	97
D.	Diskresi dalam Bayang-Bayang Keterbatasan Struktural	101
E.	Strategi Adaptif Dan Pembatasan Layanan Sebagai Coping Mechanism Institusional.....	104
F.	Dimensi Kultural Dalam Implementasi Kebijakan: Melampaui Kerangka Struktural Lipsky 107	
G.	Refleksi teoritis dan kontribusi penelitian.....	109
BAB V		112
PENUTUP		112
A.	Kesimpulan	112
B.	Rekomendasi	114
1.	Untuk Pemerintah Pusat dan Daerah	114
2.	Untuk Sekolah dan Guru Sebagai Pelaksana Kebijakan di Tingkat Lapangan.....	115
3.	Untuk Masyarakat dan Tokoh Sosial Keagamaan	115
4.	Untuk Akademisi dan Peneliti.....	116
5.	Untuk Pengembangan Jangka Panjang.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....		118
LAMPIRAN-LAMPIRAN		127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang menempatkan seluruh peserta didik termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus sebagai subjek yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan secara bermartabat dan setara. Konsep ini menekankan bahwa sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik peserta didik tanpa diskriminasi.¹ Kebijakan pendidikan inklusif menekankan bahwa sekolah harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak, bukan sebaliknya anak yang dipaksa menyesuaikan diri dengan sekolah.² Pendekatan ini berangkat dari paradigma hak asasi manusia yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan berhak menikmati layanan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas³.

¹ UNESCO, *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* (Paris: UNESCO, 1994), hlm. 8–9.

² Nesa Novrizal, "The Policy of Inclusive Education in Indonesia," *Jurnal Pendidikan Inklusif*, Vol. 02, No. 01 (2025).

³ T. Handayani dan A. S. Rahadian, "Peraturan Perundangan dan Implementasi Pendidikan Inklusif," *Masyarakat Indonesia*, Vol. 39, No. 1 (2013), hlm. 149–170.

Secara konseptual pendidikan inklusif mengandung empat elemen penting (1) pengakuan terhadap keberagaman kemampuan peserta didik; (2) penyesuaian kurikulum dan strategi pembelajaran; (3) lingkungan sekolah yang ramah terhadap keberagaman; dan (4) dukungan sosial yang melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat.⁴ Penekanan pada keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya menyangkut aspek kebijakan, tetapi juga transformasi budaya sekolah dan budaya masyarakat.

Namun demikian, implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia menyisakan kesenjangan antara konsep normatif dan praktik lapangan.⁵ Berbagai studi melaporkan bahwa sekolah seringkali belum memiliki kesiapan dari sisi tenaga pendidik, sarana prasarana, manajemen pelayanan, hingga dukungan dari masyarakat. Realitas ini menunjukkan bahwa penerapan pendidikan inklusif bersifat kompleks, tidak linear, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan geografis.⁶ Kesenjangan ini semakin diipertegas oleh temuan terbaru yang menunjukkan bahwa meskipun komitmen politik di tingkat pusat menguat, distribusi anggaran dan petunjuk teknis di tingkat daerah seringkali mengalami hambatan birokrasi yang menyebabkan sekolah di daerah tertinggal atau kepulauan harus beroperasi dengan fasilitas minimalis.⁷ Dengan

⁴ Raesetja Gloria Ledwaba, "Curriculum Adaptation for Learners with Diverse Learning Needs: A Case of South African Inclusive Rural Schools," *Journal of Inclusive Education*, Vol. 44, No. 4 (2024), hlm. 1–8.

⁵ Yulia Anjarwati Purbasari dan Wiwin Hendriani, "Perkembangan Implementasi Pendidikan Inklusi di Indonesia," *Jurnal Psikologi*, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (2021).

⁶ T. H. E. Implementation, dkk., "Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, Vol. 9, No. 1 (2024), hlm. 168–184.

⁷ O. F. Biantoro, "Kebijakan dan Tantangan Pendidikan Inklusif di Indonesia," *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 24–33.

kata lain, implementasi kebijakan pendidikan inklusif bukan hanya kebijakan administratif, melainkan interaksi antara aktor, sistem, dan nilai budaya yang ada di masyarakat.

Kabupaten Sumenep, yang terletak di Pulau Madura memiliki karakteristik yang sangat khas. Sebagai Kabupaten dengan wilayah kepulauan terbesar di Jawa Timur, kondisi sosial ekonomi masyarakatnya masih tergolong rendah, dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif. Banyak anak dengan kebutuhan khusus yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak, baik karena stigma sosial, kurangnya fasilitas, maupun minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif.

Sumenep juga memiliki struktur sosial budaya Madura yang kuat, yang memengaruhi pola interaksi sosial, pengambilan keputusan, dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan publik. Dalam budaya Madura, nilai seperti *abha, tengka'* (malu), penghormatan pada figur otoritatif seperti *kiai* dan *guru*, serta ikatan kekerabatan yang kuat berperan penting dalam menentukan sikap masyarakat terhadap isu disabilitas.

Persepsi masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) juga beragam. Pada sebagian keluarga, disabilitas dipandang sebagai amanah Tuhan sehingga mereka memilih untuk merawatnya dengan penuh kasih, sedangkan pada sebagian lain masih terdapat anggapan bahwa disabilitas adalah sesuatu yang memalukan, sehingga keberadaan ABK disembunyikan atau tidak didaftarkan ke sekolah. Ambiguitas makna inilah yang menjadikan konteks Sumenep sangat

penting untuk diteliti secara mendalam, terutama karena persepsi sosial tersebut sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

Selain faktor budaya, kondisi geografis kepulauan juga menjadi tantangan signifikan. Banyak sekolah di daerah kepulauan seperti Raas., Kangean, dan Gayam menghadapi keterbatasan guru pendamping khusus (GPK) kurangnya fasilitas aksesibilitas, serta terbatasnya pelatihan terkait inklusi. Realitas geografis ini memperbesar jarak antara kebijakan nasional dan implementasi lokal, sehingga proses inklusi pendidikan tidak hanya menghadapi hambatan kultural tetapi juga hambatan struktural dan geografis.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai langkah strategis untuk memperkuat dasar hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat daerah. Peraturan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin aksesibilitas, akomodasi yang layak, serta non-diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Melalui Perbup ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep berkewajiban menyusun program pendidikan inklusif yang meliputi pendataan anak berkebutuhan khusus (ABK), penyediaan fasilitas ramah disabilitas, serta pelatihan Guru Pendamping Khusus (GPK).

Meskipun regulasi ini telah memberikan arah yang lebih jelas bagi lembaga pendidikan, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional, serta resistensi sosial yang

masih dipengaruhi oleh nilai budaya *tengka'* (malu) dalam masyarakat Madura. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana Perbup No. 13 Tahun 2024 ini diimplementasikan di tingkat sekolah dan masyarakat, serta sejauh mana nilai-nilai sosial budaya Madura mendukung atau justru menghambat efektivitasnya.

Fenomena pendidikan inklusif di Sumenep mengandung aspek-aspek subjektif dan interpretatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh bagaimana para pelaku kebijakan memaknai disabilitas, bagaimana guru memahami konsep inklusi, bagaimana orang tua memandang masa depan anak, dan bagaimana tokoh masyarakat menilai pentingnya pendidikan bagi ABK.⁸

Makna-makna tersebut bersifat emosional, kultural, dan sangat kontekstual sehingga membutuhkan pendekatan penelitian yang mampu menggali pengalaman, persepsi, dan interpretasi sosial para pelaku. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami realitas sosial sebagaimana dialami oleh para pelaku, menggali cerita hidup, serta menangkap dinamika sosial yang tidak terlihat dalam statistik. Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan teori Street Level Bureaucracy dari Michael Lipsky, sebagai kerangka analisis utama, yang akan diuraikan secara lengkap dalam sub-bab kerangka teoritis.

Dalam konteks Sumenep, kebijakan pendidikan inklusif mengatasi tantangan unik yang dipengaruhi oleh norma budaya lokal, seperti tekanan kesopanan dan

⁸ Wiwi Purnama Dewi dan Sudadio Fadlullah, "Implementasi Pendidikan Inklusif pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Jenjang SMP di Kota Tangerang," *Jurnal Pendidikan Inklusif Indonesia*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 643–650

hierarki sosial yang kuat. Hal ini sering kali membatasi interaksi termasuk antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus (ABK), sehingga guru sebagai pelaksana kebijakan utama tersebut harus mengandalkan diskresi pribadi dalam membuat keputusan spontan di lapangan. Keputusan-keputusan ini mencakup aspek-aspek seperti apakah ABK dapat mengikuti kelas reguler, strategi adaptasi kurikulum yang sesuai, atau sejauh mana melibatkan masyarakat setempat dalam proses pendidikan. Konsep diskresi ini sejalan dengan teori Michael Lipsky tentang *street level bureaucracy* (birokrasi tingkat jalanan), dimana pejabat seperti guru publik seperti guru memiliki kebebasan untuk memahami dan menerapkan kebijakan berdasarkan konteks lokal, meskipun hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi atau bias budaya.⁹ Teori Lipsky sangat relevan karena menjelaskan bagaimana diskresi guru di Sumenep sering kali dipengaruhi oleh norma sosial yang tekanan harmoni kelompok, sehingga prioritas diberikan pada kesopanan daripada inovasi inklusif.

Selain itu, pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama kurangnya pelatihan yang memadai bagi guru dan keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan yang ramah disabilitas, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hambatan tersebut semakin kompleks dalam konteks sosial budaya Sumenep yang bersifat agraris

⁹ Hasniati, "Discretion in Education Services: Explaining Teaching-Learning Models of Learning from Home during Covid-19 Pandemic in Indonesia," *Journal of Innovation in Primary Education (JIPD)*, Vol. 6, No. 2 (2022).

dan relatif konservatif, yang turut memengaruhi kapasitas sekolah dan masyarakat dalam menikapi prinsip inklusivitas secara penuh.

Untuk memahami dinamika implementasi kebijakan pendidikan inklusif secara komprehensif, penelitian ini menggunakan teori *street level bureaucracy* dari Michael Lipsky sebagai kerangka utama, karena pendekatan ini menekankan peran para pelaksana lapangan seperti guru dan kepala sekolah sebagai aktor birokrasi tingkat bawah yang memiliki kewenangan diskresi dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan di konteks nyata, sehingga praktik di lapangan sangat dipengaruhi oleh keputusan dan interaksi mereka dalam situasi keterbatasan sumber daya dan kompleksitas konteks lokal.¹⁰

Penting digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat membentuk persepsi terhadap disabilitas melalui interaksi sosial, pengalaman kolektif, tradisi lokal, dan internalisasi nilai budaya Madura.¹¹ Konsep ini membantu menjelaskan bagaimana perspektif budaya membentuk praktik kebijakan di lapangan. Dengan demikian, konsep konstruksi sosial ini berfungsi untuk menjelaskan dimensi kultural pendidikan inklusif yakni bagaimana disabilitas dimaknai dalam konteks budaya Madura sementara analisis terhadap proses implementasi kebijakan secara struktural tetap bertumpu pada teori *street level bureaucracy* Michael Lipsky

¹⁰ B. R. de Oliveira, "Street-Level Bureaucracy and Public Policies: Analyzing Educational Policy Implementation from the Perspective of Schools and Teachers," *Educação em Revista*, Vol. 37 (2021).

¹¹ Rizka Anisa Rahman, "Rekonstruksi Sosial melalui Model Rekayasa Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Difabel: Studi Kasus di Yayasan CIQAL Yogyakarta," *Jurnal Pemberdayaan Difabel*, Vol. 3, No. 3 (2024).

Sejalan dengan kerangka tersebut, penelitian tentang pendidikan inklusif telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan pentingnya faktor guru, dukungan sekolah, dan keterlibatan orang tua.¹² Namun sebagian besar penelitian tersebut dilakukan di daerah perkotaan dengan akses layanan pendidikan yang relatif lebih baik.

Sementara itu, penelitian tentang pendidikan inklusif di daerah kepulauan yang memiliki kultur lokal kuat seperti Kabupaten Sumenep masih relatif terbatas. sedikit kajian yang menelaah bagaimana nilai-nilai sosial budaya Madura membentuk konstruksi makna inklusi, serta bagaimana peran masyarakat secara faktual mempengaruhi proses implementasi.¹³ sebagai konsekuensinya, celah empiris ini menjadi ruang kajian penting yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada peran aktor-aktor lokal yakni komunitas masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah dalam mendukung penerapan kebijakan pendidikan inklusif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk sinergi yang efektif untuk mengatasi kendala implementasi, sekaligus merumuskan rekomendasi praktis bagi penguatan kapasitas sekolah dan komunitas. Selain itu, studi ini akan mendokumentasikan praktik-praktik terbaik dari konteks lain yang telah berhasil menerapkan pendidikan inklusif sebagai bahan pembelajaran yang kontekstual bagi Kabupaten Sumenep.

¹² Andriawan Fajar Ramadhan dan Ika Maryani, "Management of Inclusive Education in Public Schools," *Jurnal Pendidikan Inklusif*, Vol. 8 (2024), hlm. 67–77.

¹³ *Ibid.*, hlm. 7.

Secara teoritik dan praktis, diharapkan temuan penelitian ini memberi kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, khususnya pada daerah berkarakteristik khas seperti Kabupaten Sumenep. hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan aktor masyarakat dalam upaya membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pengembangan ilmu, tetapi juga pada perubahan sosial yang konstruktif mendorong terciptanya lingkungan belajar yang ramah bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Akhirnya, rekomendasi dan praktik yang dihasilkan diharapkan menggugah kesadaran kolektif dan memacu kolaborasi lintas aktor untuk mewujudkan visi pendidikan yang lebih adil dan merata di Kabupaten Sumenep.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama terkait implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kab Sumenep. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa fokus utama, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMASNU Sumenep dalam kerangka Perbup No. 13 Tahun 2024?
2. Bagaimana praktik diskresi guru sebagai Street Level Bureaurats dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif di SMASNU Sumenep?

3. Bagaimana nilai-nilai sosial budaya masyarakat Madura membentuk dan memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMASNU Sumenep?

C. Tujuan dan Signifikansi

Pertama, berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMASNU Sumenep dalam kerangka Perbup No. 13 Tahun 2024. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai tantangan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMASNU Sumenep, baik dari sisi kebijakan, infrastruktur, maupun respons sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana nilai-nilai sosial budaya masyarakat Madura turut membentuk penerimaan dan pelaksanaan pendidikan inklusif di daerah tersebut, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dengan menggunakan kerangka analisis teori implementasi Michael Lipsky. Lebih jauh, penelitian ini bermaksud mengevaluasi peran serta masyarakat dan budaya Madura dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

Kedua, penelitian ini memiliki signifikansi yang multidimensional, mencakup aspek akademik, praktis, dan sosial yang saling berkaitan dalam upaya pengembangan pemahaman dan praktik pendidikan inklusif di Indonesia. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks budaya lokal, khususnya budaya Madura. Penelitian ini memperkaya pemahaman teoritis tentang model implementasi bottom-up dengan menunjukkan bagaimana faktor lingkungan sosial budaya dapat berfungsi sebagai *enabling environment* dalam implementasi kebijakan, berbeda dari asumsi umum yang melihat faktor lingkungan sebagai *constraining corridor*. Kontribusi teoritis utama penelitian ini terletak pada eksplorasi bagaimana teori implementasi Michael Lipsky dapat di aplikasikan dalam konteks organisasi berbasis nilai yang tidak sepenuhnya

bergantung pada dukungan struktural formal. Temuan ini diharapkan dapat menghasilkan proposisi teoritis baru tentang tantangan apa saja yang muncul baik dari aspek kebijakan, sumber daya manusia, maupun penerimaan masyarakat, serta memberikan wawasan tentang mekanisme adaptasi kebijakan dalam konteks budaya masyarakat Madura secara spesifik

Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki implikasi yang luas untuk berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan inklusif di Indonesia secara umum dan di SMASNU Sumenep terkhusus. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini menyediakan wawasan berbasis bukti untuk pengembangan kebijakan pendidikan inklusif yang lebih responsif terhadap keragaman institusi pendidikan di Indonesia. Temuan tentang Bagaimana kebijakan pendidikan inklusif dijalankan di tengah realitas sosial dan budaya masyarakat Madura, dan Bagaimana nilai-nilai dan norma sosial masyarakat Madura mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam menjalankan pendidikan inklusif. Bagi instansi tempat penelitian ini dan lembaga-lembaga pendidikan inklusif lainnya, hasil penelitian ini dapat menjadi model rujukan bagi lembaga lain yang ingin mengembangkan program pendidikan inklusif. Dokumentasi tentang inovasi-inovasi lokal.

Bagi praktisi pendidikan inklusif, temuan tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi dalam konteks budaya lokal masyarakat Madura memberikan pembelajaran berharga tentang strategi alternatif dalam mengatasi tantangan implementasi pendidikan inklusif, khususnya dalam kondisi keterbatasan sumber daya formal. Penelitian ini juga menawarkan perspektif bagi pemerintah daerah tentang Bagaimana nilai-nilai dan norma sosial masyarakat Madura mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam menjalankan pendidikan inklusif.

Secara sosial, penelitian ini berkontribusi pada upaya mengubah paradigma dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan inklusif dan penyandang disabilitas melalui demonstrasi praktik inklusif yang berhasil dalam konteks sosial budaya masyarakat. Hal ini memiliki potensi dampak yang signifikan mengingat

Kabupaten sumenep terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, dengan latar belakang sosial ekonomi budaya yang beragam. sehingga terdapat kesenjangan pemahaman antar wilayah. Maka, penelitian ini dapat memberikan masukan strategis untuk memperkuat implementasi pendidikan inklusif yang kontekstual, adil, dan berkelanjutan di daerah-daerah dengan karakter budaya yang khas seperti Sumenep. Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kerangka kebijakan pendidikan inklusif yang lebih adaptif terhadap keragaman konteks sosial budaya dan variasi pendekatan implementasi di tingkat lokal.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini membahas secara sistematis perkembangan pendidikan inklusif, tantangan implementasinya di Indonesia, relevansi nilai sosial budaya masyarakat Madura, serta komunitas dan tokoh lokal dalam memastikan keberhasilan pendidikan inklusif. Selain itu, kajian ini menelaah teori implementasi kebijakan yang menjadi kerangka analitis penelitian, terutama model bottom-up yang menekankan pada peran aktor lokal dan konteks budaya dalam mempengaruhi efektifitas kebijakan. Kajian ini penting untuk melihat sejauh mana kebijakan pendidikan inklusif dapat berjalan efektif dalam konteks sosial budaya yang memiliki karakteristik khusus seperti Madura.

Pendidikan inklusif bertumpu pada prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan hak yang dijamin konstitusi dan berbagai instrumen pendidikan nasional. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit mengamanatkan penyediaan layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, maupun sosial. Ketentuan ini diperkuat dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang

mengharuskan setiap pemerintah daerah memastikan akses pendidikan inklusif pada seluruh jenjang pendidikan.¹⁴

Secara global, komitmen pendidikan inklusif diperkuat melalui *UNESCO Salamanca Statement* dan *Global Education Monitoring Report* yang menegaskan bahwa pendidikan inklusi merupakan strategi kunci untuk mencapai tujuan SDGs 4.¹⁵ Dalam kerangka tersebut, pendidikan inklusif tidak hanya dipahami sebagai konsep pedagogis, tetapi sebagai agenda kebijakan publik yang bertujuan memastikan bahwa tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam akses pendidikan.

Namun, berbagai survei internasional termasuk UNICEF menggambarkan bahwa pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan struktural di negara berkembang, termasuk Indonesia. Kompetensi guru, kesiapan infrastruktur, dan resistensi sosial terhadap penyandang disabilitas merupakan faktor yang paling sering disebut sebagai penghambat implementasi.¹⁶

Meskipun kerangka kebijakan nasional telah cukup kuat, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia belum berjalan optimal. Berbagai penelitian mengidentifikasi hambatan pada level regulasi, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Mukti mengidentifikasi bahwa banyak sekolah inklusif belum memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) yang kompeten, sementara fasilitas pendukung seperti ruang belajar adaptif, alat bantu belajar, dan aksesibilitas gedung sangat terbatas.¹⁷ Andriyana menambahkan bahwa rendahnya literasi guru reguler mengenai pedagogi inklusif menjadi faktor utama rendahnya efektifitas pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.¹⁸ Juntak menunjukkan

¹⁴ M. Yulius, "Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," *Lex Administratum*, Vol. 8, No. 3 (2020).

¹⁵ UNESCO, *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education – All Means All*, Paris: UNESCO, 2020.

¹⁶ UNICEF, *Situation of Children with Disabilities in Asia and the Pacific*, (New York: UNICEF, 2022).

¹⁷ Husnul Mukti, dkk., "Analisis Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Implementasi Kebijakan," *Kaganga: Jurnal Pendidikan*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 55–68.

¹⁸ Ade Andriyana, "Problematika Implementasi Sekolah Inklusi di Indonesia," *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 102–115.

bahwa lemahnya sistem monitoring dan akuntabilitas membuat pendidikan inklusif sering menjadi slogan tanpa implementasi nyata.¹⁹

Dalam konteks pendidikan berbasis keagamaan, tesis Ainun Rofiq dari Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga memberikan perspektif penting mengenai pendidikan inklusif sebagai praktik sosial yang beririsan dengan nilai-nilai institusional dan budaya. Bersarkan abstraknya, Ainun menegaskan bahwa pendidikan dinklusif tidak cukup dimaknai sebagai kajian penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi menuntut perubahan paradigma pendidik dan lembaga pendidikan dalam memandang keberagaman kemampuan peserta didik.²⁰ Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara komitmen normatif terhadap inklusivitas dan praktik pembelajaran sehari-hari yang masih dipengaruhi oleh nilai tradisional serta keterbatasan dukungan kelembagaan.

Sejalan dengan temuan tersebut, sejumlah artikel nasional menempatkan guru sebagai aktor kunci dalam pendidikan inklusif. Padmadewi dkk, melalui survei persepsi guru menunjukkan bahwa sebagian besar pendidik memiliki sikap positif terhadap pendidikan inklusif, namun belum diimbangi dengan kesiapan pedagogis yang memadai.²¹ Penelitian lain menegaskan bahwa keterbatasan pelatihan dan pendampingan profesional menyebabkan pendidikan inklusif sering dijalankan secara intuitif dan tidak sistemis.²² Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kapasitas individu guru di tengah keterbatasan dukungan struktural.

Selain faktor pedagogis, kajian lain mengkaji pendidikan inklusif dari perspektif kebijakan dan kelembagaan. Nahampun dkk, melalui studi pustaka menyimpulkan bahwa kesenjangan antara kebijakan pendidikan inklusif dan

¹⁹ Justin Juntak, "Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Analisis Kesiapan Sekolah," *Ministrate: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 23–35.

²⁰ Ainun Rofiq, *Implementasi Pendidikan Inklusif berbasis Nilai Islam di Pesantren Ainul Yaqin: Analisa Kebijakan Publik* (Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2024).

²¹ Ni Nyoman Padmadewi, dkk., "Teachers' Perceptions and Challenges of Inclusive Education," *Indonesian Journal of Instruction* 5, no. 3 (2024).

²² Wulandari dan Pratiwi, "Kompetensi Guru dalam Pendidikan Inklusif," *Jurnal Pendidikan Dasar* 13, no. 2 (2022).

praktik sekolah masih menjadi persoalan dominan di Indonesia.²³ Kebijakan inklusif sering kali belum diikuti dengan mekanisme implementasi yang jelas dan dukungan teknis yang berkelanjutan dari pemerintah daerah. Disertasi Sari, juga menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pendidikan inklusif masih cenderung normatif dan administratif, sementara aspek pendampingan sekolah dan penguatan kapasitas guru belum menjadi prioritas.²⁴

Perkembangan kajian pendidikan inklusif kemudian bergeser pada dimensi sosial dan kultural. Beberapa penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh cara masyarakat memaknai disabilitas. Atika, menunjukkan bahwa stigma sosial dan persepsi keluarga terhadap anak penyandang disabilitas masih menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar.²⁵

Kajian lain menyoroti pentingnya keterlibatan komunitas dan orang tua, dalam mendukung pendidikan inklusif, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat lokal berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berkelanjutan. Disisi lain masyarakat Indonesia timur dan pesisir khususnya di Sumenep, norma sosial, nilai adat, dan kepercayaan lokal sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas.²⁶ Beberapa masyarakat menganggap disabilitas sebagai cobaan yang harus disyukuri, sementara yang lain menghubungkannya dengan stigma atau beban keluarga. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan budaya dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Dalam konteks inilah studi tentang pendidikan inklusif di Madura menjadi relevan, mengingat masyarakat Madura memiliki karakter sosial budaya yang khas, kuat, dan sangat berpengaruh terhadap perilaku kolektif.

²³ Debi Yanti Nahampun, dkk., "Pendidikan Inklusif di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 10, no. 2 (2024).

²⁴ N. Sari, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Tingkat Daerah* (Disertasi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2023).

²⁵ Atika, "Pendidikan Inklusif dan Tantangan Sosial Budaya," *Harakat an-Nisa*, Vol. 5, no. 1 (2024).

²⁶ S. Walton & S. Priestley, "Cultural Perceptions of Disability in Southeast Asia," *Asian Social Work and Policy Review*, Vol. 14, No. 3 (2020), hlm. 200–213.

Masyarakat Madura dikenal memiliki nilai-nilai sosial budaya yang kuat, seperti *bhuppa'-bhabbhu'-ghuru-rato'*, yang menempatkan orang tua, guru dan pemerintah sebagai figur otoritas moral. Nilai ini menciptakan struktur sosial hierarkis yang menjadikan kiai dan guru sangat berpengaruh dalam menentukan penerimaan masyarakat terhadap inovasi pendidikan. Penelitian Wiyata menunjukkan bahwa solidaritas komunal, nilai harga diri (tengka'), dan kepatuhan pada kiai menjadi pilar budaya yang membentuk perilaku masyarakat Madura.²⁷ Nilai-nilai ini dapat berfungsi sebagai modal sosial yang sangat kuat untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif jika diarahkan dengan tepat.

Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan adanya tantangan budaya. Studi Hidayah menemukan bahwa sebagian keluarga Madura masih memandang disabilitas sebagai sumber rasa malu atau beban moral, sehingga enggan mengungkapkan kondisi anak kepada masyarakat.²⁸ Hal ini berpotensi menghambat partisipasi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan formal.

Kajian etnografis oleh Kuntowijoyo dan Zamhari menunjukkan bahwa peran kiai dalam masyarakat Madura tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pemegang kekuasaan simbolik dan sosial.²⁹ Maka, keberhasilan implementasi pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada keterlibatan otoritas kultural seperti kiai dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan celah kajian tersebut, penelitian ini menempatkan diri untuk melengkapi dan memperkaya literatur pendidikan inklusif di Indonesia. Penelitian tentang implementasi pendidikan inklusif di SMASNU Sumenep berkontribusi dengan menghadirkan analisis empiris mengenai interaksi antara kebijakan daerah khususnya Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2024 dengan nilai-nilai sosial budaya Madura, praktik sekolah, serta peran guru dan

²⁷ Latief Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LKiS, 2020.)

²⁸ Nurul Hidayah, "Stigma Disabilitas dalam Perspektif Budaya Madura," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 145–160.

²⁹ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Madura* (Jakarta: Depdikbud, 2020); Zamhari, "Otoritas Kiai dalam Konteks Sosial Madura," *Islamica*, Vol. 15, No. 1 (2021), hlm. 75–92.

masyarakat dalam memaknai disabilitas. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek teknis dan kelembagaan, penelitian ini mendokumentasikan praktik adaptasi dan inisiatif lokal yang berkembang di tingkat sekolah dan komunitas, yang selama ini jarang tercatat dalam kajian pendidikan inklusif. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan pendidikan inklusif yang lebih kontekstual, berkelanjutan, dan sensitif terhadap karakter sosial budaya daerah.

E. Kerangka Teoritis

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif analisis di SMASNU Sumenep memerlukan kerangka analisis yang mampu menjelaskan bagaimana kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara kontekstual di tingkat lokal, khususnya dalam masyarakat dengan sistem nilai sosial budaya yang kuat seperti Madura. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan formal, tetapi juga sebagai agen sosial yang berinteraksi dengan norma, nilai, dan budaya lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bersifat dinamis, di mana aktor-aktor di tingkat akar rumput (*bottom level*) berperan besar dalam membentuk bentuk akhir dari kebijakan yang diterapkan di lapangan.

Untuk memahami proses implemmtasi yang bersifat *bottom-up*, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Michael Lipsky (1980) tentang *street level bureaucracy*, yang menekankan pada aktor pelaksana di tingkat bawah (guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan orang tua) dalam memaknai dan menyesuaikan kebijakan sesuai konteks sosial dan sumber daya yang tersedia. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh pendekatan teori budaya dan nilai sosial masyarakat Madura, serta teori partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik untuk memahami bagaimana struktur sosial dan kultural berpengaruh terhadap eektivitas kebijakan pendidikan inklusif.

1. Biografi Michael Lipsky

Michael Lipsky merupakan salah satu tokoh penting dalam studi kebijakan publik, khususnya dalam studi implementasi kebijakan, yang dikenal

melalui pengembangan pendekatan *bottom-up*. Pendekatan ini lahir dari kritik terhadap perspektif *top-down* yang selama ini memandang kebijakan publik sebagai instrumen teknokratis yang dapat dijalankan secara linear sesuai dengan desain normatif di tingkat pusat. Sebagaimana ditegaskan oleh Tummers dan Bekkers³⁰, Lipsky memandang bahwa kebijakan publik pada praktiknya justru dibentuk ulang di tingkat pelaksanaan melalui interaksi langsung antara kebijakan dan masyarakat.

Secara akademik, Michael Lipsky adalah profesor emiretus di bidang ilmu politik dan kebijakan publik yang lama berkiprah di Massachusetts Institute of Technology (MIT). Latar belakang pemikirannya tidak terlepas dari riset empiris yang ia lakukan terhadap praktik pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, Hupe, Hill, dan Buffat³¹ mencatat bahwa kontribusi utama Lipsky terletak pada keberhasilannya menunjukkan bahwa aktor-aktor pelaksana di tingkat lapangan seperti guru dan tenaga layanan publik tidak sekadar menjalankan perintah administratif, melainkan memiliki peran strategis dalam menafsirkan kebijakan sesuai dengan situasi konkret yang mereka hadapi.

Lebih lanjut, Lipsky menekankan bahwa para pelaksana kebijakan bekerja dalam kondisi yang jauh dari ideal, seperti keterbatasan sumber daya, tekanan waktu, serta tuntutan kebijakan yang sering kali ambigu dan saling bertentangan. Dalam kondisi demikian, diskresi menjadi mekanisme yang tidak terelakkan. Temuan ini menjadi semakin relevan ketika diaplikasikan dalam konteks negara berkembang, sebab dalam sistem pendidikan di negara-negara dengan keterbatasan struktural, implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan adaptasi aktor pelaksana di tingkat bawah.³²

³⁰ L. Tummers dan V. Bekkers, "Policy Implementation, Street-Level Bureaucracy, and the Importance of Discretion," *Public Management Review*, Vol. 24, No. 4 (2022), hlm. 527–546.

³¹ P. Hupe, M. Hill, dan A. Buffat, *Understanding Street-Level Bureaucracy*, Edisi ke-2 (Bristol: Bristol University Press, 2022), hlm. 87–102.

³² Oliveira, B. R. de. (2021). *Street-level bureaucracy and public policies. Educação em Revista*.

Oleh karena itu, teori *street level bureaucracy* terus digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk memahami bagaimana kebijakan publik dijalankan dalam kondisi nyata yang sarat dengan keterbatasan dan kompleksitas sosial budaya.

2. Karya-Karya Utama Michael Lipsky

Karya paling berpengaruh dari Michael Lipsky adalah buku *Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1980 dan hingga kini tetap menjadi rujukan utama dalam studi kebijakan publik. Dalam karya tersebut, Lipsky memperkenalkan istilah *Street Level Bureaucracy* untuk merujuk pada pelaksana kebijakan di tingkat bawah yang memiliki interaksi langsung dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebijakan publik pada akhirnya tidak hanya tercermin dalam dokumen resmi, tetapi diwujudkan melalui keputusan-keputusan mikro yang diambil oleh aktor pelaksana dalam praktik sehari-hari.

Dalam penjelasannya, Lipsky menunjukkan bahwa diskresi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan bukanlah bentuk penyimpangan dari sistem birokrasi, melainkan konsekuensi logis dari kondisi kerja yang mereka hadapi. Diskresi muncul sebagai respons terhadap keterbatasan struktural, seperti minimnya sumber daya, ketidakjelasan tujuan kebijakan, serta tuntutan masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, kebijakan publik tidak pernah hadir sebagai teks yang netral, tetapi selalu mengalami proses penafsiran dan penyesuaian ketika diimplementasikan di lapangan.³³

Pemikiran Lipsky kemudian berkembang menjadi fondasi bagi studi-studi implementasi kebijakan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada praktik. Suatu penelitian menunjukkan bahwa teori *street level bureaucracy* banyak digunakan dalam kajian kebijakan pendidikan karena mampu menjelaskan variasi implementasi kebijakan antar sekolah dan antar wilayah.

³³ Maynard-Moody, S., & Musheno, M. (2021). *Cops, teachers, counselors*. University of Michigan Press.

Dalam konteks pendidikan, bahwa diskresi guru dan kepala sekolah sering kali menjadi faktor penentu apakah kebijakan inklusi benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik pembelajaran.³⁴ Dengan demikian, meskipun Lipsky tidak banyak menghasilkan karya baru dalam beberapa dekade terakhir, relevansinya justru semakin diperkuat oleh penelitian-penelitian empiris kontemporer. Teori *street level bureaucracy* terus digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk memahami bagaimana kebijakan publik dijalankan dalam kondisi nyata yang sarat dengan keterbatasan dan kompleksitas sosial budaya.

3. Relevansi Teori Street Level Bureacracy

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada praktiknya merupakan proses yang kompleks dan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui desain kebijakan formal semata. Dalam konteks ini, teori *street level bureaucracy* yang dikembangkan oleh Michael Lipsky menjadi kerangka analitis yang relevan karena menempatkan aktor pelaksana di tingkat lapangan sebagai penentu utama bagaimana kebijakan dijalankan dalam realitas sehari-hari. Lipsky menegaskan bahwa pelaksana kebijakan seperti guru dan kepala sekolah tidak sekadar menjalankan aturan, tetapi secara aktif menafsirkan, menyesuaikan, dan bahkan memodifikasi kebijakan berdasarkan kondisi konkret yang mereka hadapi, termasuk keterbatasan sumber daya, tekanan sosial, serta tuntutan dari lingkungan sekitar.³⁵

Dalam penelitian ini, guru dan kepala sekolah diposisikan sebagai *street level bureaucrats* yang berhadapan langsung dengan peserta didik berkebutuhan khusus, orang tua, dan masyarakat. Posisi strategis ini memberi makna ruang diskresi yang luas dalam menentukan bentuk layanan pendidikan inklusif, seperti keputusan menerima atau menolak peserta didik disabilitas, strategi adaptasi kurikulum, pengelolaan kelas inklusif, hingga pola komunikasi dengan orang tua. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa

³⁴ Rahayu, R. (2025). *Diskresi aktor street-level bureaucrat dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Responsive.*

³⁵ Tummers, L., & Bekkers, V. (2022). Policy implementation, street-level bureaucracy, and the importance of discretion. *Public Management Review*, 24(4), hlm. 527–546.

diskresi tersebut bukan anomali dalam implementasi kebijakan, melainkan karakter inheren dari birokrasi tingkat bawah, khususnya di sektor pendidikan yang sarat dengan interaksi manusia dan ketidakpastian situasi.³⁶

Relevansi teori Lipsky semakin kuat dalam konteks Kabupaten Sumenep, khususnya pada lembaga SMASNU, yang memiliki karakter geografis kepulauan serta struktur sosial budaya Madura yang kental. Keterbatasan fasilitas pendidikan, minimnya Guru Pendamping Khusus (GPK), serta belum meratanya pelatihan guru menciptakan kondisi implementasi kebijakan yang jauh dari ideal. Dalam situasi seperti ini, guru dan kepala sekolah dituntut untuk melakukan berbagai bentuk adaptasi lokal agar layanan pendidikan tetap berjalan. Penelitian kontemporer tentang implementasi kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa adaptasi semacam ini sering kali menjadi mekanisme utama keberlanjutan kebijakan, meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam regulasi formal.³⁷

Dalam penelitian ini, teori Lipsky digunakan secara operasional untuk menganalisis: (1) bagaimana pelaksana kebijakan memahami dan memaknai kebijakan pendidikan inklusif; (2) bagaimana diskresi digunakan dalam praktik pembelajaran dan pengelolaan sekolah; serta (3) bagaimana nilai-nilai sosial dan keterbatasan struktural memengaruhi keputusan-keputusan implementatif di tingkat lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan secara normatif, tetapi juga berupaya memahami logika praktik (*logic of practice*) yang melandasi tindakan para pelaksana kebijakan.

Dengan demikian, penggunaan teori *street level bureaucracy* dalam penelitian ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk membaca implementasi kebijakan pendidikan inklusif secara kontekstual dan realistis.

³⁶ Maynard-Moody, S., & Musheno, M. (2021). *Cops, teachers, counselors: Stories from the front lines of public service*. University of Michigan Press.

³⁷ Hupe, P., Hill, M., & Buffat, A. (2022). *Understanding street-level bureaucracy* (2nd ed.). Bristol University Press.

Teori ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika hubungan antara kebijakan formal dan praktik sosial di tingkat lokal, sekaligus menjelaskan mengapa pendidikan inklusif di Kabupaten Sumenep berkembang dalam bentuk-bentuk yang adaptif, beragam, dan sangat dipengaruhi oleh aktor pelaksana kebijakan.

4. Teori Implementasi Kebijakan Publik: Pendekatan Bottom-Up

Implementasi kebijakan publik merupakan proses dinamis yang tidak hanya bergantung pada desain kebijakan formal tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, perilaku aktor pelaksana, dan respons kelompok sasaran. Dalam literatur ilmu kebijakan, terdapat dua pendekatan utama: model top-down yang menekankan kendali pemerintah pusat, serta model bottom-up yang menekankan peran aktor lokal.³⁸ Model bottom-up menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh interaksi, adaptasi, dan diskresi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan di tingkat bawah (street level). Pendekatan ini relevan digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif, yang sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor seperti guru, kepala sekolah, masyarakat, orang tua, dan tokoh agama.

Thomas B. Smith menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang melibatkan empat variabel: idealized policy, implementing organization, target group, dan environmental factors.³⁹ Dalam konteks penelitian ini, keempat variabel tersebut tampak dalam interaksi antara kebijakan pendidikan inklusif nasional, kapasitas lembaga pendidikan, karakteristik siswa ABK, serta nilai sosial budaya masyarakat Madura yang memengaruhi penerimaan terhadap pendidikan inklusif.

Faktor lingkungan sosial budaya sangat penting dicermati karena kebijakan tidak pernah diimplementasikan di ruang hampa. Nilai-nilai komunal, hierarki

³⁸ Hill, Michael & Hupe, Peter. *Implementing Public Policy* (London: Sage, 2002).

³⁹ Smith, Thomas B. "Policy Implementation and Bureaucracy." *Public Administration Review*, (1973).

sosial, kepercayaan religius, dan norma adat dapat menjadi faktor pendorong sekaligus penghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Dalam masyarakat Madura, misalnya, nilai tengka' (malu) dan konsep kehormatan keluarga dapat menghambat partisipasi anak ABK dalam pendidikan formal, sementara penghormatan tinggi kepada guru dan kiai dapat menjadi modal sosial untuk mendorong pendidikan inklusif.⁴⁰ Dengan demikian, pendekatan bottom-up menjadi kerangka teoritis yang tepat untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pendidikan inklusif diterjemahkan, dinegosiasi, dan diadaptasi di Kabupaten Sumenep.

Teori *street level bureaucracy* (SLB) yang dikembangkan Michael Lipsky menjadi kerangka teoritis utama dalam penelitian ini. Lipsky berpendapat bahwa pelaksana kebijakan di tingkat bawah seperti guru, tenaga kesehatan, dan birokrat lokal memiliki peran sangat strategis dalam menentukan bagaimana kebijakan benar-benar dijalankan.⁴¹ Menurut Lipsky, pelaksana kebijakan memiliki diskresi atau kebebasan dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan berdasarkan realitas yang mereka hadapi. Diskresi muncul karena kebijakan seringkali tidak menyediakan pedoman operasional yang jelas, atau kondisi lapangan terlalu kompleks untuk diatur secara rinci. Selain diskresi, Lipsky secara eksplisit menekankan otonomi sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari perilaku Street Level Bureaucrats, kemandirian pelaksana di lapangan terbentuk secara struktural karena atasan tidak mungkin mengawasi

Dalam konteks Sumenep, diskresi guru tampak dalam modifikasi kurikulum, penyesuaian metode pembelajaran, serta penanganan sosial terhadap siswa berkebutuhan khusus. Guru sering bertindak tidak hanya sebagai pelaksana instruksi formal, tetapi juga sebagai mediator budaya antara kebijakan nasional dan nilai masyarakat Madura. Lipsky menekankan bahwa

⁴⁰ Wiyata, A. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. LKiS, (2006).

⁴¹ Lipsky, Michael. *Street-Level Bureaucracy: Dilemma of the Individual in Public Services* (New York: Russell Sage Foundation, 1980).

street level bureaucracy bekerja dalam kondisi keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, maupun dukungan institusional.⁴² Kondisi ini menyebabkan para pelaksana kebijakan melakukan berbagai bentuk adaptasi seperti prioritisasi, simplikasi, dan improvisasi. Dalam konteks pendidikan inklusif di Sumenep, keterbatasan ini tampak pada kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK), minimnya fasilitas yang aksesibel, dan lemahnya pelatihan profesional tentang pedagogi inklusif.

Keunikan teori Lipsky adalah pengakuannya bahwa proses implementasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dipengaruhi norma sosial, nilai masyarakat, dan interaksi sosial.⁴³ Dalam masyarakat Madura, nilai seperti bhuppa'-bhabbhu'-ghuru-rato', religiusitas yang kuat, serta peran kiai menjadi faktor penting yang mempengaruhi cara guru dan sekolah menerjemahkan kebijakan pendidikan inklusif.

Lipsky memandang implementasi sebagai proses negosiasi antara tuntutan kebijakan, ekspektasi masyarakat, nilai budaya, serta keterbarasan sumber daya. Negosiasi ini menghasilkan variasi implementasi, mulai dari inovasi kreatif hingga distorsi kebijakan. Dalam konteks Sumenep, negosiasi tampak dalam upaya sekolah menyeimbangkan nilai komunitas lokal, harapan orang tua, tuntutan kurikulum nasional, dan kondisi siswa ABK.

Berdasarkan dari uraian di atas kerangka teoritis penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Sumenep merupakan hasil interaksi antara kebijakan formal dan tindakan adaptif para pelaksana di tingkat lokal. Teori Lipsky memberikan landasan konseptual untuk memahami dinamika tersebut melalui konsep diskresi, adaptasi, dan negosiasi kebijakan.

Dalam konteks sosial budaya Madura, teori ini memperlihatkan bahwa pelaksana kebijakan tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dalam

⁴² Lipsky, Michael. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service*. Russell sage foundation, 1980, hlm. 27-28

⁴³ Ibid., hlm. 44.

sistem nilai sosial yang hidup dan berpengaruh terhadap setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori Lipsky untuk menganalisis bagaimana guru dan kepala sekolah sebagai *street-level bureaucrats* menafsirkan kebijakan pendidikan inklusif, bagaimana nilai sosial budaya masyarakat Madura membentuk praktik kebijakan tersebut, serta bagaimana partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan pendidikan inklusif yang berkeadilan dan kontekstual.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan desain Studi Kasus tunggal untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Sumenep. Dengan menyoroti tiga dimensi utama, yakni tantangan pelaksanaan kebijakan, nilai-nilai sosial budaya masyarakat Madura, serta peran masyarakat dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam, di mana makna, proses, dan dinamika interaksi antar-aktor lebih penting daripada sekadar angka atau hasil yang terukur.

Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk menggali fenomena implementasi kebijakan yang kompleks dan kontekstual, khususnya dalam masyarakat dengan struktur sosial dan nilai budaya yang kuat seperti Madura. Pertama, implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Sumenep melibatkan interaksi dinamis antara struktur kebijakan formal dan nilai-nilai sosial budaya lokal yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK). Nilai-nilai seperti *tengka'* (*malu*), *abâ'* (*harga*

diri), dan solidaritas komunal khas Madura dapat mempengaruhi cara kebijakan diterima dan dijalankan di tingkat masyarakat. Kedua, fenomena ini merupakan realitas sosial yang dikonstruksi oleh para aktor kebijakan di tingkat bawah, seperti guru, kepala sekolah, orang tua, tokoh masyarakat, dan perangkat desa, yang menafsirkan serta menyesuaikan kebijakan sesuai konteks dan sumber daya lokal. Ketiga, dalam konteks pendidikan inklusif di Sumenep, proses adaptasi dan inovasi lokal sering kali muncul dari inisiatif para pelaksana lapangan bukan semata-mata dari instruksi kebijakan pusat sehingga memerlukan eksplorasi mendalam untuk memahami mekanisme implementasi yang bersifat *bottom-up*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal dengan karakteristik instrumental, di mana sekolah beberapa sekolah reguler inklusif di Kabupaten Sumenep dijadikan lokasi utama penelitian. Kasus ini dipilih karena mewakili konteks pelaksanaan kebijakan inklusif di daerah dengan karakter sosial budaya Madura yang kental, serta menunjukkan dinamika nyata bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam praktik lokal. Sekolah inklusif yang penulis teliti telah melayani anak berkebutuhan khusus sejak sebelum diberlakukannya Perbup Sumenep Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, sehingga menyediakan konteks historis yang kaya untuk menelusuri proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif dari bawah (*bottom-up*).

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Meskipun fenomena kebutuhan pendidikan bagi peyandang disabilitas terjadi hampir di seluruh Indonesia, di sini penulis membatasi kajiannya di Sumenep. Dengan demikian, Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Swasta Nahdlatul Ulama (SMASNU) yang berlokasi di Dalem Anyar, Bangselok, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Setelah penulis melakukan upaya keras untuk mencari lokasi penelitian, karena ketika di lapangan terdapat beberapa kendala seperti: ketidaksediaannya lembaga untuk di jadikan lokasi penelitian, pihak lembaga mengatakan tidak menyelenggarakan pendidiakan inklusif, padahal menurut beberapa rekomendasi lembaga lain, lembaga tersebut menyelenggarakan, dan juga terdapat beberapa lembaga mencantumkan diri sebagai penyelenggara pendidikan inklusi, tetapi ketika penulis survey tidak menemukan bukti bahwa yang seharusnya ada anak berkebutuhan khusus dan guru yang memiliki pelatihan khusus untuk anak ABK bukan hanya guru dan siswa reguler saja.

Maka lembaga SMASNU inilah yang penulis putuskan sebagai lokasi penelitian. Lokasi ini dipilih secara purposive berdasarkan beberapa pertimbangan strategis dan kontekstual. Pertama, lembaga ini menunjukkan keterbukaan terhadap keberagaman peserta didik, baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus (ABK). Kedua, praktik pendidikan inklusif di sekolah ini berkembang secara organik dan partisipatif, bukan semata-mata karena adanya mandat formal dari kebijakan pemerintah, melainkan lahir dari inisiatif, nilai sosial, dan komitmen lokal lembaga terhadap prinsip

kesetaraan pendidikan. Hal ini sejalan dengan kerangka pendekatan bottom-up Michael Lipsky, yang menekankan peran aktor pelaksana di tingkat akar rumput dalam menafsirkan dan menjalankan kebijakan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

Penelitian lapangan dilaksanakan dalam kurun waktu Agustus hingga November 2025. Rentang waktu tersebut memungkinkan peneliti melakukan observasi mendalam dan berulang terhadap dinamika keseharian sekolah, interaksi antara guru dan siswa, serta hubungan sosial antara lembaga dan masyarakat sekitar. Pemilihan periode ini juga mempertimbangkan siklus kegiatan akademik dan administrasi sekolah, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam berbagai konteks kegiatan.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria relevansi, pengalaman, dan tingkat keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Subjek penelitian terdiri dari beberapa kategori informan yang mewakili berbagai tingkat pelaksana dan pengambil kebijakan, dengan tujuan memperoleh triangulasi perspektif dan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:

- **Informan utama** yaitu Ibu Sri Farida, Kepala Sekolah SMASNU, yang diwawancarai pada 12 Oktober 2025. Sebagai Kepala Sekolah, beliau memiliki strategis dalam pengambilan kebijakan. Penentuan arah

kebijakan internal, serta pengembangan program pendidikan inklusif di lembaga tersebut. Wawancara dengan kepala sekolah difokuskan pada aspek visi dan misi pendidikan, landasan filosofis inklusivitas, proses penerimaan siswa reguler dan ABK, serta strategi lembaga dalam mengharmoniskan nilai-nilai sosial budaya Madura dengan prinsip kesetaraan pendidikan.

- **Informan pelaksana** diwakili oleh Ibu Chusnul Khotimah, guru Bimbingan Konseling sekaligus pendamping siswa berkebutuhan khusus, yang diwawancarai pada 21 September 2025. Guru di pilih sebagai informan kunci karena mereka merupakan pelaksana langsung kebijakan (street-level bureaucrats) yang menghadapi realitas sehari-hari dalam penerapan kebijakan inklusif. Melalui guru, peneliti menggali informasi mengenai strategi pedagogis yang digunakan, bentuk adaptasi kurikulum, tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran, serta dinamika interaksi sosial antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus.
- **Informan pemerintah**, yaitu Ibu Tina, Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kab Sumenep, yang diwawancarai pada 2 Oktober 2025, Informan ini memberikan perspektif dari tingkat kebijakan struktural, khususnya mengenai dukungan kebijakan pemerintah daerah, program pelatihan guru, dan arah implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Sumenep. Wawancara dengan pejabat Dinas juga membantu memahami hubungan koordinatif antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan.

Pemilihan informan dari berbagai tingkatan (struktur, kelembagaan dan pelaksana) ini dimaksudkan untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh dan saling melengkapi, sekaligus memastikan keabsahan data melalui triangulasi sumber. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip model implementasi *bottom-up* Michael Lipsky yang menekankan adanya empat komponen utama dalam analisis kebijakan, yakni:

- a. Aktor Pelaksana Kebijakan (*street-level bureaucrats*), yaitu individu yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan memiliki diskresi dalam penerapan kebijakan
- b. Konteks Sosial dan Budaya Lokal, yang mempengaruhi interpretasi kebijakan di lapangan
- c. Proses Adaptasi dan Negosiasi antara kebijakan formal dan kebutuhan masyarakat; serta
- d. Dinamika Hubungan antara Masyarakat dan Lembaga Publik, yang menentukan sejauh mana kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan lokal.

Oleh karena itu, pemilihan lokasi dan subjek penelitian ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga berlandaskan pada kerangka konseptual penelitian, dimana sekolah dan aktor lokal diposisikan sebagai subjek aktif yang membentuk keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif melalui tindakan, adaptasi, dan nilai-nilai sosial budaya Madura yang mereka miliki.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang paling melengkapi: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis

dokumentasi. Wawancara mendalam menjadi teknik utama, dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi yang muncul selama proses wawancara sambil tetap mempertahankan fokus pada topik penelitian.

Wawancara dengan kepala sekolah difokuskan pada pemahaman tentang landasan filosofis pendidikan inklusif, proses historis penerimaan siswa/i berkebutuhan khusus, dan pengembangan metodologi pembelajaran. Wawancara dengan guru diarahkan untuk memahami implementasi praktis di tingkat pembelajaran, termasuk metode adaptasi, tantangan yang dihadapi, dan dinamika interaksi antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus.

Wawancara dengan perwakilan daerah pemerintah bertujuan untuk memahami perspektif kebijakan formal, bentuk dukungan yang telah diberikan, tantangan dalam menjangkau lembaga formal dan kolaborasi masa depan. Semua wawancara direkam dengan persetujuan informan dan transkrip secara verbatim untuk keperluan analisis.

Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung implementasi pendidikan inklusif dalam aktivitas sehari-hari sekolah, termasuk kegiatan pembelajaran, interaksi sosial antar siswa, dan praktik pengawasan/pengasuhan analisis dokumentasi meliputi review terhadap foto, dokumen internal sekolah, regulasi pemerintah terkait, dan publikasi yang relevan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga komponen utama, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Model ini bersifat siklikal dan interaktif, artinya proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap awal pengumpulan data hingga hasil penelitian, agar diperoleh pemahaman yang progresif, mendalam, dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti.

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis sesuai dengan kerangka teoritis implementasi kebijakan *bottom-up* Michael Lipsky. Analisis dilakukan dengan cara membaca ulang transkrip wawancara, mencatat makna penting, melakukan pengkodean, serta mengidentifikasi pola-pola makna yang berulang dan relevan dengan fokus penelitian, yakni tantangan implementasi kebijakan pendidikan inklusif, pengaruh nilai-nilai sosial budaya Madura, dan peran masyarakat lokal dalam mendukung pendidikan inklusif.

Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memusatkan perhatian, dan mengabstraksi data yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan melalui coding dan kategorisasi berdasarkan kerangka teoritis implementasi kebijakan *Street-Level Bureaucracy* Michael Lipsky. Data dari transkrip wawancara dan catatan observasi diklasifikasikan ke dalam empat komponen utama yang menjadi fokus analisis:

- a. Kebijakan Ideal, yaitu bagaimana lembaga pendidikan (SMASNU) memahami, menafsirkan, dan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan inklusif sebagaimana yang diamanatkan dalam kebijakan nasional;
- b. Kelompok Sasaran (Target Group), yaitu karakteristik siswa berkebutuhan khusus (ABK) dan respons sosial mereka terhadap kebijakan inklusif di lingkungan sekolah;
- c. Organisasi Pelaksana, yaitu kapasitas, strategi adaptasi, dan mekanisme pengambilan keputusan lembaga pendidikan serta peran guru sebagai *street-level bureaucrats*, yang memiliki diskresi dalam penerapan kebijakan di tingkat praktis; dan
- d. Faktor Lingkungan (Environmental Factors), yaitu pengaruh nilai-nilai sosial budaya masyarakat Madura seperti *tengka'*, *abâ'*, *gotong royong*, dan *ta'dhim* terhadap penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

Reduksi data dilakukan secara terus-menerus dengan menyingkirkan informasi yang tidak relevan dan menonjolkan data yang berkaitan langsung dengan dinamika implementasi kebijakan, tantangan lapangan, dan adaptasi kultural yang muncul.

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk matriks analisis, bagan tematik, dan narasi deskriptif. Penyajian ini bertujuan untuk menampilkan hubungan antar kategori serta visual dan konseptual, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola-pola interaksi, konflik nilai, dan strategi adaptasi antar aktor kebijakan.

Penyajian data dilakukan dengan menampilkan temuan dari tiap kategori utama, misalnya bagaimana guru menafsirkan prinsip inklusi, bagaimana kepala sekolah mengelola sumber daya dan kebijakan internal, serta bagaimana masyarakat memaknai keberadaan siswa ABK dalam konteks budaya Madura. Melalui penyajian ini, terlihat adanya pola interaksi sosial antara kebijakan formal dan nilai-nilai sosial budaya lokal, sebagaimana dijelaskan dalam teori Lipsky bahwa implementasi kebijakan selalu dipengaruhi oleh negosiasi antara tuntutan struktural dan realitas lapangan.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara bertahap dan reflektif. Kesimpulan awal mulai dirumuskan sejak proses pengumpulan data, kemudian diverifikasi secara berulang melalui perbandingan antar-sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memastikan konsistensi temuan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data dalam konteks teori implementasi kebijakan *bottom-up*, khususnya untuk memahami ketegangan (tensions) yang muncul antara kebijakan ideal (top-down) dengan praktik lapangan (*bottom-up*). Analisis ini juga menggunakan pola transaksi dan adaptasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan di sekolah dan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, perbedaan nilai, dan tuntutan sosial-budaya. Melalui proses ini, diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan pendidikan inklusif dijalankan, dimaknai, dan diadaptasi oleh pelaku lokal di Kabupaten Sumenep.

5. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan model triangulasi, pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian ini benar-benar menggambarkan realitas empirik yang terjadi di lapangan, bukan hasil persepsi subjektif peneliti semata.

a. Triangulasi Sumber

Menggunakan berbagai sumber data, dengan membandingkan dan mengecek keebnaran data, seperti wawancara dengan berbagai informan yang memiliki peran berbeda dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari:

- 1) Kepala sekolah yaitu ibu sri farida sebagai pengambil keputusan dan pembentuk arah kebijakan internal lembaga;
- 2) Guru pendamping khusus yaitu ibu chusnul khotimah sebagai pelaksana langsung kebijakan di tingkat kelas dan interaksi sehari-hari;
- 3) Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep (Ibu Tina) sebagai representasi pemerintah daerah yang memahami konteks kebijakan formal; serta
- 4) Dokumen dan arsip sekolah, seperti pedoman kurikulum, catatan administrasi siswa berkebutuhan khusus, dan laporan kegiatan inklusif.

Perbandingan lintas sumber ini memungkinkan peneliti menilai konsistensi narasi, menemukan perbedaan persepsi, dan memahami dinamika yang muncul antara kebijakan formal dan praktik lapangan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data terhadap sumber yang sama, yaitu melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Misalnya, data mengenai strategi pembelajaran inklusif tidak hanya diperoleh dari wawancara guru, tetapi juga diverifikasi melalui pengamatan langsung proses belajar-mengajar dan dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pendekatan ini memperkuat kredibilitas temuan dan membantu peneliti menghindari bias interpretatif.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda, antara Agustus hingga November 2025, untuk melihat konsistensi praktik dan dinamika implementasi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini penting mengingat praktik pendidikan inklusif di sekolah bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kegiatan akademik, penyesuaian kurikulum, dan interaksi sosial yang berkembang.

d. Member Check dan Audit Trail

Peneliti juga melakukan member check, yaitu mengonfirmasi hasil interpretasi awal kepada para informan utama untuk memastikan akurasi makna dan menghindari kesalahan tafsir.

Selain itu, dilakukan audit trail, yaitu pencatatan seluruh proses penelitian secara rinci (mulai dari catatan lapangan, transkrip wawancara, hingga proses coding) agar penelitian ini memiliki jejak metodologis yang transparan dan dapat ditelusuri kembali bila diperlukan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab utama yang saling berkaitan dan membentuk alur logis untuk menjelaskan fokus dan temuan penelitian secara menyeluruh. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan: Pada bab pembuka ini, bagian pengantar yang menjelaskan latar belakang pentingnya penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Sumenep. Di dalamnya dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran teoritis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar konseptual yang mengantarkan pembaca pada urgensi penelitian dan relevansinya terhadap konteks sosial budaya masyarakat Madura, terutama dalam memahami bagaimana kebijakan publik diimplementasikan dari bawah (*bottom-up process*) oleh para pelaku pendidikan di lapangan.

Bab II

Gambaran Umum: Bab ini menyajikan deskripsi kontekstual mengenai wilayah penelitian, yaitu Kabupaten Sumenep, dengan menekankan pada karakteristik sosial, budaya, dan religius masyarakat Madura yang memengaruhi pelaksanaan pendidikan inklusif. Pembahasan dalam bab ini mencakup: profil geografis dan demografis kabupaten Sumenep, termasuk kondisi pendidikan secara umum. Struktur sosial dan nilai-nilai budaya lokal, seperti solidaritas komunal, penghormatan terhadap otoritas (ta'dhim), dan semangat gotong royong; Gambaran lembaga penelitian sebagai lokasi studi kasus, termasuk sejarah berdirinya, visi-misi pendidikan, serta karakteristik siswa berkebutuhan khusus yang dilayani. Bab ini memberikan konteks empiris dan sosiokultural untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan inklusif diterjemahkan dan diadaptasi di tingkat akar rumput.

Bab III

Penelitian dan Pembahasan Lapangan : Bab ini menyajikan temuan empiris utama yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus pembahasan diarahkan pada proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMASNU, dengan memperhatikan, persepsi dan peran aktor pelaksana, tantangan dan hambatan, peran nilai-nilai sosial budaya madura, inovasi dan bentuk adaptasi lokal. Bab ini menjadi inti deskriptif penelitian, menggambarkan dinamika interaksi antara kebijakan, budaya, dan pelaku di tingkat akar rumput sesuai dengan perspektif bottom-up implementation.

Bab IV

Analisis dan Interpretasi Teoritis: Bab ini menguraikan analisis mendalam terhadap temuan lapangan dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan bottom-up Michael Lipsky (Street-Level-Bureaucracy). Analisis difokuskan pada empat komponen utama yang relevan dengan konteks pendidikan inklusif, yaitu: a) Kebijakan formal dan ruang diskresi, yang dimiliki oleh pelaksana di tingkat sekolah; b) kelompok sasaran (target group), yakni siswa berkebutuhan khusus dan masyarakat sekitar, beserta respons sosial yang muncul; c) organisasi pelaksana, yang meliputi kapasitas lembaga sekolah dan mekanisme adaptasi terhadap kebijakan pusat; d) konteks lingkungan sosial-budaya, yaitu bagaimana nilai-nilai lokal Madura memengaruhi proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di lapangan. Dalam bab ini, dilakukan penafsiran kritis terhadap hubungan antara kebijakan nasional dan praktik lokal, sekaligus menyoroti peran para aktor di tingkat pelaksana (guru, kepala sekolah, masyarakat) sebagai “street-level bureaucrats” yang menafsirkan, menyesuaikan, dan mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan realitas sosialnya.

Bab V

Penutup: Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis teoritis dan temuan empiris, menjawab rumusan masalah yang telah diajukan di awal penelitian. Selain itu, disampaikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat implementasi pendidikan inklusif yang berbasis budaya lokal. Bab ini juga memuat rekomendasi teoretis dan arah penelitian

lanjutan, terutama terkait penerapan teori implementasi kebijakan dalam konteks pendidikan di wilayah berkarakter sosial-budaya kuat seperti Madura

Dengan sistematika tersebut, penelitian ini diharapkan dapat tersaji secara terstruktur dan argumentatif, dan koheren, sehingga pembaca dapat memahami hubungan logis antara konteks. Teori, metode, dan temuan. Struktur ini juga menunjukkan kontribusi akademik penelitian dalam menghubungkan teori implementasi kebijakan (Lipsky) dengan praktik pendidikan inklusif nilai sosial budaya lokal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

berdasarkan analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMASNU Sumenep dengan menggunakan perspektif teori *Street Level Bureaucracy* dari Lipsky, penelitian ini berhasil menjawab ketiga rumusan masalah yang telah ditetapkan dan menghasilkan kontribusi teoritis yang substantif.

Pertama, terkait dengan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMASNU Sumenep, penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan tidak berlangsung secara mekanis sesuai dengan teks regulasi formal. dalam praktiknya, kebijakan mengalami proses adaptasi dan interpretasi di tingkat sekolah. Dengan demikian, kebijakan pendidikan inklusi di SMASNU lebih mencerminkan proses negosiasi antara norma formal dan realitas sosial pendidikan di lapangan.

Kedua, terkait dengan pertanyaan mengenai bagaimana praktik diskresi guru dalam implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi guru merupakan elemen sentral dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif, tetapi sebagai aktor yang secara aktif menfasirkan dan menyesuaikan kebijakan dalam praktik pembelajaran. Diskresi yang dilakukan bersifat adaptif progresif, yakni sebagai strategi untuk menjaga keberlanjutan layanan pendidikan inklusi di tengah keterbatasan struktural. Dengan demikian, diskresi guru di SMASNU tidak sekadar menjadi mekanisme coping terhadap tekanan kebijakan, tetapi juga

menjadi instrumen kreatif dalam memastikan kebijakan tetap berjalan secara substantif.

Ketiga, terkait dengan pertanyaan mengenai relevansi teori *Street Level Bureaucracy* dalam menjelaskan praktik implementasi tersebut, penelitian ini mengafirmasi bahwa teori Lipsky relevan dalam memahami peran diskresi aktor lapangan. Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat religius komunal seperti Madura, praktik diskresi tidak semata-mata dipengaruhi oleh tekanan administratif dan keterbatasan sumber daya sebagaimana diasumsikan dalam formulasi awal teori. Nilai-nilai religius, tanggung jawab moral, serta norma sosial kolektif turut membentuk orientasi tindakan guru dalam mengimplementasikan kebijakan inklusi. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas pemahaman teori *Street Level Bureaucracy* dengan menambahkan dimensi sosial budaya sebagai variabel yang signifikan dalam membentuk praktik diskresi.

Secara teoritis, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMASNU Sumenep tidak semata-mata ditentukan oleh struktur kebijakan, tetapi oleh relasi dinamis antara regulasi, kapasitas institusi, dan orientasi moral aktor pelaksana. Diskresi guru berfungsi sebagai jembatan antara norma kebijakan dan realitas kelas, sekaligus sebagai mekanisme transformasi kebijakan dari teks formal menjadi praktik pedagogis yang kontekstual. Oleh karena itu, penguatan pendidikan inklusi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan regulatif, tetapi harus disertai penguatan kapasitas guru, dukungan struktural yang memadai, serta pengakuan terhadap peran diskresi

sebagai elemen dalam implementasi kebijakan pendidikan. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan inklusi di SMASNU Sumenep, tetapi juga menawarkan refleksi teoritis bahwa kebijakan publik pada akhirnya memperoleh maknanya melalui tindakan aktor lapangan yang menghidupkannya dalam praktik sehari-hari.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk pengembangan pendidikan inklusif yang lebih efektif di Indonesia.

1. Untuk Pemerintah Pusat dan Daerah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMASNU Sumenep masih sangat bergantung pada kapasitas adaptif guru akibat keterbatasan dukungan struktural. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat desain implementasi kebijakan melalui penyediaan guru pendamping khusus (GPK) secara proporsional dan merata, khususnya bagi sekolah swasta yang juga menjalankan mandate inklusi.

Selain rekrutmen tenaga profesional, pemerintah perlu memastikan adanya program pelatihan berkelanjutan yang bersifat aplikatif dan kontekstual, bukan sekadar formalitas administratif. Dukungan anggaran untuk sarana pembelajaran inklusif, perangkat asesmen kebutuhan khusus, serta pendampingan teknis kepada sekolah perlu diperkuat agar implementasi kebijakan tidak sepenuhnya bertumpu pada diskresi individual guru. Kebijakan inklusi akan lebih berkelanjutan apabila diperkuat oleh sistem yang mendukung, bukan hanya regulasi normatif.

2. Untuk Sekolah dan Guru Sebagai Pelaksana Kebijakan di Tingkat Lapangan

Sekolah perlu membangun tata kelola pendidikan inklusif yang lebih sistematis, termasuk penyusunan pedoman operasional internal, mekanisme identifikasi kebutuhan peserta didik, serta forum refleksi antar guru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa diskresi guru SMASNU bersifat adaptif dan progresif, namun tanpa dukungan sistem internal yang kuat, praktik tersebut berpotensi menjadi beban individual yang tidak terdistribusi secara kolektif.

Bagi guru, praktik diskresi yang telah berjalan secara kontekstual perlu terus dikembangkan dalam kerangka profesionalisme pedagogis. Diskresi hendaknya tidak hanya menjadi respons spontan terhadap keterbatasan, tetapi didukung oleh refleksi akademik, pengembangan kompetensi, serta kolaborasi antar rekan sejawat. Penguatan komunitas belajar guru menjadi penting agar pengalaman praktik inklusi dapat dikonstruksi sebagai pengetahuan kolektif, bukan hanya pengalaman personal.

3. Untuk Masyarakat dan Tokoh Sosial Keagamaan

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai religius dan kultur komunal memiliki pengaruh dalam membentuk orientasi moral guru dalam menjalankan kebijakan inklusi. Oleh karena itu, masyarakat dan tokoh sosial keagamaan memiliki peran strategis dalam membangun legitimasi sosial terhadap pendidikan inklusif.

Dukungan masyarakat diperlukan untuk mengurangi stigma terhadap peserta didik berkebutuhan khusus serta memperkuat penerimaan sosial di lingkungan sekolah. Pendidikan inklusif perlu dipahami sebagai bagian dari

tanggung jawab sosial dan moral bersama, bukan hanya tugas institusi pendidikan. Kolaborasi antar sekolah dan komunitas lokal dapat menjadi modal sosial yang memperkuat keberlanjutan kebijakan secara kontekstual.

4. Untuk Akademisi dan Peneliti

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik diskresi dalam implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor administratif dan struktural, tetapi juga oleh dimensi sosial budaya dan nilai religius. Sebabnya, penelitian lanjutan perlu mengintegrasikan pendekatan kebijakan publik dengan perspektif sosiologi dan kultural agar analisis implementasi kebijakan menjadi lebih komprehensif.

Penelitian komparatif antar wilayah atau antar jenis sekolah juga penting untuk mengidentifikasi variasi praktik diskresi dalam konteks sosial yang berbeda. Selain itu, pengembangan model implementasi kebijakan yang lebih kontekstual terhadap karakter masyarakat Indonesia dapat menjadi kontribusi penting dalam memperkaya studi kebijakan pendidikan.

5. Untuk Pengembangan Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, penguatan pendidikan inklusif di Indonesia memerlukan transformasi paradigma dari pendekatan administratif menuju pendekatan sistemik dan kultural. Pendidikan inklusif tidak cukup dipahami sebagai kewajiban regulatif, tetapi harus diinternalisasikan sebagai nilai dasar dalam budaya sekolah dan sistem pendidikan nasional.

Integrasi kompetensi pendidikan inklusif dalam kurikulum pendidikan guru di perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan calon guru yang memiliki kesiapan pedagogis sejak awal. Dengan demikian, praktik

inklusi di masa mendatang tidak lagi sangat bergantung pada diskresi individual yang bersifat adaptif, tetapi telah di topang oleh sistem yang matang, terstruktur, dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Andriyana, "Problematika Implementasi Sekolah Inklusi di Indonesia," *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 102–115.
- Ahmad Supriyanto, *Pesantren and Inclusion: Local Religious Authority and Disability Acceptance in Madura* (Surabaya: Pustaka Humaniora, 2022), hlm. 44.
- Ainscow, M, "Developing inclusive education systems: what are the levers for change?" *Journal of educational change*, Vol. 6, No. 2 (20205), hlm. 109-124.
- Ainscow, M., Slee, R., & Best, M, "The Salamanca Statement: 25 Years On," *International Journal of Inclusive Education* (2022).
- Ainun Rofiq, *Implementasi Pendidikan Inklusif berbasis Nilai Islam di Pesantren Ainul Yaqin: Analisis Kebijakan Publik* (Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2024).
- Alifah, "Stigma Disabilitas dalam Masyarakat Madura," *Humaniora Nusantara*, Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 115–130.
- Alifah, Nur. "Stigma Disabilitas dalam Masyarakat Madura." *Humaniora Nusantara*, Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 88–95.
- Andriawan Fajar Ramadhan dan Ika Maryani, "Management of Inclusive Education in Public Schools," *Jurnal Pendidikan Inklusif*, Vol. 8 (2024), hlm. 67–77.
- Ardianti, A. R., Setiaji, C. A., & Widayarsi, C, "Peer Interaction and Inclusive Learning Environment," *Jurnal Pendidikan Inklusif* (2025).
- Arifin, "Community-Based Inclusion in Rural Education," *Journal of Rural Education*, (2020).
- Atika, "Pendidikan Inklusif dan Tantangan Sosial Budaya," *Harakat an-Nisa*, Vol. 5, no. 1 (2024).
- B. R. de Oliveira, "Street-Level Bureaucracy and Public Policies: Analyzing Educational Policy Implementation from the Perspective of Schools and Teachers," *Educação em Revista*, Vol. 37 (2021).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep 2023. (*Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2023*).

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, *Sumenep dalam Angka 2023* (Sumenep: BPS, 2023).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. *Sumenep dalam Angka 2023*. (Sumenep: BPS, 2023).
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Pendidikan 2023* (Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, 2023).
- Debi Yanti Nahampun, dkk., “Pendidikan Inklusif di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 10, no. 2 (2024).
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, *Data Guru Pendamping Khusus 2023* (Sumenep: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, 2023).
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, *Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Inklusif Kabupaten Sumenep Tahun 2023* (Sumenep: Dispendik Sumenep, 2023), hlm. 7.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, *Data Satuan Pendidikan Tahun 2023* (Sumenep: Dispendik Sumenep, 2023), hlm. 12.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, *Dokumen Program Pendidikan Inklusif* (Sumenep: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, 2024).
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, *Laporan Rapat Kordinasi Pendidikan Inklusif* (Sumenep: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, 2024).
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, *Pendataan Anak Berkebutuhan Khusus di Satuan Pendidikan* (Sumenep: Dispendik Sumenep, 2023), hlm. 4.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, *Data sekolah inklusif 2023* (Sumenep: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, 2023).
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, *Laporan Implementasi Pendidikan Inklusif Jawa Timur Tahun 2023* (Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2023).
- Dinas Sosial Kabupaten Sumenep. *Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Sumenep Tahun 2023* (Sumenep: Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, 2023).
- Firdaus, A. H., Husna, M. A., & Azizah, N. (2026). “Kyai Leadership Drives Sustainable Inclusive Education in Islamic Boarding Schools: Kepemimpinan Kyai Mendorong Pendidikan Inklusi Berkelanjutan di Pesantren,” *Indonesian*

- Journal of Education Methods Development*, Vol. 21, No.1 (2026), hlm. 10-21
- Firdaus, A. H., Husna, M. A., & Azizah, N. (2026). Kyai Leadership Drives Sustainable Inclusive Education in Islamic Boarding Schools: Kepemimpinan Kyai Mendorong Pendidikan Inklusi Berkelanjutan di Pesantren. *Indonesian Journal of Education Methods Development*, 21(1), 10-21070.
- Hargreaves, A., & Fullan, M, *Professional capital: Transforming teaching in every school*. (New York: Teachers College Press, 2015).
- Hasniati, "Discretion in Education Services: Explaining Teaching-Learning Models of Learning from Home during Covid-19 Pandemic in Indonesia," *Journal of Innovation in Primary Education (JIPD)*, Vol. 6, No. 2 (2022).
- Hidayat Syamsul, "Social Cohesion in Madurese Communities," *Journal of Indonesian Social Studies*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 77–79.
- Hidayat, "Social Cohesion in Madurese Communities," *Asian Social Studies Review* 6, no. 1 (2021).
- Hidayat, "Social Cohesion in Madurese Communities," *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 6, No. 1, (2021).
- Hill, Michael & Hupe, Peter. *Implementing Public Policy* (London: Sage, 2002).
- Hupe, P., Hill, M., & Buffat, A. (2022). *Understanding street-level bureaucracy* (2nd ed.). Bristol University Press.
- Husnul Mukti, dkk., "Analisis Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Implementasi Kebijakan," *Kaganga: Jurnal Pendidikan*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 55–68.
- Ibid., hlm. 57.
- Justin Juntak, "Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Analisis Kesiapan Sekolah," *Ministrate: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 23–35.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Data Pendidikan Inklusif Nasional 2023* (Jakarta: Kemendibudristek,2023).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Profil Penyandang Disabilitas di Indonesia* (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2022).
- Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Madura* (Jakarta: Depdikbud, 2020);

- Zamhari, "Otoritas Kiai dalam Konteks Sosial Madura," *Islamica*, Vol. 15, No. 1 (2021), hlm. 75–92.
- Kuntowijoyo, *Struktur Sosial Madura* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2022).
- L. Tummers dan V. Bekkers, "Policy Implementation, Street-Level Bureaucracy, and the Importance of Discretion," *Public Management Review*, Vol. 24, No. 4 (2022), hlm. 527–546.
- Latief Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LKiS, 2020.)
- Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Sumenep, *Dokumen Profil Lembaga* (Sumenep: LP Ma'arif NU, 2022), hlm. 5.
- Lipsky, Michael. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service*. Russell sage foundation, 1980, hlm. 27-28
- Lipsky, Michael. *Street-Level Bureaucracy: Dilemma of the Individual in Public Services* (New York: Russell Sage Foundation, 1980).
- Lipsky, Michael. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation (1980), hlm. 27–28.
- M. Iskandar, "Inklusi Pendidikan di Wilayah Kepulauan," *Jurnal Pendidikan Inklusif Indonesia*, Vol. 3, no. 1 (2021).
- M. Yulius, "Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," *Lex Administratum*, Vol. 8, No. 3 (2020).
- Maynard-Moody, S., & Musheno, M. (2021). *Cops, teachers, counselors*. University of Michigan Press.
- Maynard-Moody, S., & Musheno, M. (2021). *Cops, teachers, counselors: Stories from the front lines of public service*. University of Michigan Press.
- Maynard-Moody, S., & Musheno, M. "Cops, Teachers, Counselors: Stories from the Front Lines of Public Service." University of Michigan Press,(2021) hlm. 12–14
- Michael Lipsky, *Op. Cit.*, hlm. 13–16. Lihat juga R. Rahayu, "Diskresi Aktor Street-Level Bureaucrat dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif," *Responsive* (2025).

- N. Sari, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Tingkat Daerah* (Disertasi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2023).
- Navrátilová, J., & Jurčík, M, “Analysing the intersection between teachers ‘peer learning strategies and students’ perspectives in inclusive classrooms,” *Education Inquiry* (2025), hlm. 1-21.
- Nesa Novrizal, "The Policy of Inclusive Education in Indonesia," *Jurnal Pendidikan Inklusif*, Vol. 02, No. 01 (2025).
- Ni Nyoman Padmadewi, dkk., “Teachers’ Perceptions and Challenges of Inclusive Education,” *Indonesian Journal of Instruction* 5, no. 3 (2024).
- Nilsson, I. A., & Moström, S, “Seeing differently in inclusive education: ethnographic pathways and reflexive practices,” *Ethnography and Education* (2025), hlm. 1-16.
- Nurlita Wati, “Teacher Challenges in Inclusive Practice in Rural Schools,” *Jurnal Pendidikan Khusus*, Vol. 18, No. 2 (2023), hlm. 101–117.
- Nurul Alifah, “Stigma Disabilitas dalam Masyarakat Madura,” *Humaniora Nusantara*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 55–70.
- Nurul Hidayah, “Stigma Disabilitas dalam Perspektif Budaya Madura,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 145–160.
- O. F. Biantoro, "Kebijakan dan Tantangan Pendidikan Inklusif di Indonesia," *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 24–33.
- Oliveira, B. R. de. (2021). "Street-Level Bureaucracy and Public Policies: Analyzing Educational Policy Implementation from the Perspective of Schools and Teachers." *Educação em Revista*, 37, hlm. 6–9.
- Oliveira, B. R. de. (2021). *Street-level bureaucracy and public policies. Educação em Revista*.
- P. Hupe, M. Hill, dan A. Buffat, *Op. Cit.*, hlm. 87–102.
- P. Hupe, M. Hill, dan A. Buffat, *Understanding Street-Level Bureaucracy*, Edisi ke-2 (Bristol: Bristol University Press, 2022), hlm. 87–102.
- Pemerintah Desa Gapura Barat, *Laporan Dana Desa untuk Aksesibilitas Pendidikan* (Sumenep: Pemerintah Desa Gapura Barat, 2023).

- Pemerintah Kabupaten Sumenep, *Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, 2024.
- Pemerintah Kabupaten Sumenep, *Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*.
- Pemerintah Kabupaten Sumenep, *Perbup Sumenep No. 13 Tahun 2024*, Bab IV.
- Pemerintahan Kabupaten Sumenep, *Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Susunan Perangkat Daerah*.
- Raesetja Gloria Ledwaba, "Curriculum Adaptation for Learners with Diverse Learning Needs: A Case of South African Inclusive Rural Schools," *Journal of Inclusive Education*, Vol. 44, No. 4 (2024), hlm. 1–8.
- Rahayu, R. (2025). *Diskresi aktor street-level bureaucrat dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Responsive*.
- Ridho, M.. *Diskursus Disabilitas dalam Al-Qur'an*. (Jakarta: Mata Kata Inspirasi, 2023).
- Ridho. M, *Diskursus Disabilitas Dalam Al-Qur'an: Tafsir, Paradigma, dan Praktik di Lembaga Pendidikan* (Jakarta: Mata Kata Inspirasi, 2023).
- Rifai, "Cultural Interaction in Eastern Madura Islands," *Journal of Maritime Culture*, Vol. 5, No. 3 (2022).
- Rifai, "Cultural Shame and Disability in Rural Madura," *Jurnal Sosiologi Universitas Jember* (2022).
- Rifai, "Cultural Shame and Disability in Rural Madura," *Jurnal Sosiologi Univeritas Jember*, (2022).
- Rizka Anisa Rahman, "Rekonstruksi Sosial melalui Model Rekeyasa Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Difabel: Studi Kasus di Yayasan CIQAL Yogyakarta," *Jurnal Pemberdayaan Difabel*, Vol. 3, No. 3 (2024).
- S. Walton & S. Priestley, "Cultural Perceptions of Disability in Southeast Asia," *Asian Social Work and Policy Review*, Vol. 14, No. 3 (2020), hlm. 200–213.
- Shakespeare, T., & Watson, N. "Frameworks, models, theories, and experiences for understanding disability". dalam *The Oxford handbook of the sociology of disability*, (Oxford: Oxford University Press, 2022), hlm. 17-37.

- Smith, Thomas B. "Policy Implementation and Bureaucracy." *Public Administration Review*, (1973).
- Sulton Muminah dan Tjahjo Suprajogo, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Bottom-Up," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 4 (2025), hlm. 1485–1495.
- Sunardi, D. P., & Sugini, M. A. "Typical challenges faced by sub-urban state primary schools implementing inclusive education in Indonesia," *IJLTER. ORG*, Vol. 23 No. 3 (2024), hlm. 468.
- Sunardi, Yusuf, & Gunarhadi, "Inclusive Education in Indonesia." *International Journal of Inclusive Education* (2021).
- Supriyanto, Ahmad. "Pesantren and Inclusive Education in Rural Java." *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1 (2022), hlm. 55–78.
- Supriyanto, Ahmad. *Pesantren and Inclusion: Local Religious Authority and Disability Acceptance in Madura*. Surabaya: Pustaka Humaniora, 2022, hlm. 44;
- Supriyanto, *Pesantren and Inclusion in Madura* (Malang: UIN Malang Press, 2022).
- Supriyanto, *Pesantren and Inclusion*, (2022).
- T. H. E. Implementation, dkk., "Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, Vol. 9, No. 1 (2024), hlm. 168–184.
- T. Handayani dan A. S. Rahadian, "Peraturan Perundangan dan Implementasi Pendidikan Inklusif," *Masyarakat Indonesia*, Vol. 39, No. 1 (2013), hlm. 149–170.
- Tummers, L., & Bekkers, V. (2022). Policy implementation, street-level bureaucracy, and the importance of discretion. *Public Management Review*, 24(4), hlm. 527–546.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaga Negara RI Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871*.
- UNESCO, *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education – All Means All*, Paris: UNESCO, 2020.
- UNESCO, *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education – A Tool on Whose Terms?* (Paris: UNESCO, 2023).
- UNESCO, *Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education – All Means All* (Paris: UNESCO, 2023).
- UNESCO, *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* (Paris: UNESCO, 1994), hlm. 8–9.
- UNICEF, *Situation of Children with Disabilities in Asia and the Pacific*, (New York: UNICEF, 2022).
- United Nations. General Assembly, *Convention on the rights of persons with disabilities and optional protocol* (New York: United Nations, 2007).
- Vorlíček, R.. dan Kollerová, L, “Non-inclusive teaching of students with special educational needs in a socioeconomically disadvantaged neighbourhood,” *International Journal of Inclusive Education*, Vol. 30, No. 2 (2026), hlm. 189-203.
- Wahyuni, S, “Policy Implementation of Inclusive Education in Indonesia.” *Journal of Educational Policy Studies* (2022).
- Wati, “Teacher Challenges in Inclusive Practice,” *Jurnal Inklusi Indonesia*, Vol. 5, No. 1, (2023).
- Wiwi Purnama Dewi dan Sudadio Fadlullah, "Implementasi Pendidikan Inklusif pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Jenjang SMP di Kota Tangerang," *Jurnal Pendidikan Inklusif Indonesia*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 643–650
- Wiyata, A. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. LKiS, (2006).
- Wiyata, A. L, *Carok; Konflik Kekerasan & Harga Diri Orang Madura*. (Lkis Pelangi Aksara 2002).
- Wulandari dan Pratiwi, “Kompetensi Guru dalam Pendidikan Inklusif,” *Jurnal Pendidikan Dasar* 13, no. 2 (2022).

Yulia Anjarwati Purbasari dan Wiwin Hendriani, "Perkembangan Implementasi Pendidikan Inklusi di Indonesia," *Jurnal Psikologi*, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (2021).

